

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	10

BAB II KONSTRUKSI HUKUM PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN

2.1	Pengaturan Pemberian Gaji dan Tunjangan untuk ASN	12
2.1.1	Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.....	12
2.1.2	Pemberian gaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019	17
2.1.3	Perda Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.....	25
2.2	Kewenangan Pemberian Gaji dan Tunjangan untuk ASN	26
2.2.1	Kewenangan Pemberian Gaji dan Tunjangan untuk ASN Pusat	26
2.2.2	Kewenangan Pemberian Gaji dan Tunjangan untuk ASN Daerah	27
2.3	Pendekatan Hukum Administrasi dalam Pemberian Gaji dan Tunjangan`	28
2.3.1	Pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan	29
2.3.2	Pendekatan Hak Asasi Manusia	30
2.3.3	Pendekatan Fungsionaris	35

BAB III AKIBAT HUKUM BAGI PEMERINTAH DAERAH YANG TIDAK BISA MEMENUHI PP 19 TAHUN 2018

3.1	Keabsahan Tindakan Pemerintahan dalam Penentuan Pemberian
-----	---

Gaji dan Tunjangan Hari Raya	39
3.1.1 Wewenang	40
3.1.2 Prosedur	45
3.1.3 Substansi	46
3.2 Implementasi PP No. 19 Tahun 2018 dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	47
3.2.1 Keberlakuan PP 19 tahun 2018 dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara	48
3.2.2 Keberlakuan PP 19 tahun 2018 dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah.....	55
3.3 Akibat Hukum bagi Pemerintah Daerah yang tidak mengimplemetasikan PP Nomor 19 Tahun 2018.....	61
3.3.1 Implementasi PP Nomor 19 Tahun 2018 di Kota Surabaya	64
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	69
LAMPIRAN	73